

## **EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DESA/KELURAHAN MANDIRI GOTONG ROYONG OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SUBANG**

Sumarna<sup>1\*</sup>, Indra Kristian<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Ghifari

\*Korespondensi: asepsumarna1968@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah evaluasi studi kasus model kelembagaan. Evaluasi kebijakan program pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, ketidakefektifan ini akan mengganggu serta berdampak kepada progress pemberdayaan masyarakat dan kelembagaannya di seluruh Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Subang. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang terhadap masyarakat Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, karena tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Subang, sehingga pembangunan desa berlanjut tanpa pengelolaan, tahapan penilaian Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang lama membuat desa/kelurahan menjadi jenuh.

**Kata Kunci :** Evaluasi Dampak Kebijakan, Pemberdayaan Desa/Kelurahan, Kemandirian Desa/Kelurahan

### **ABSTRACT**

*The policy of the Village/Kelurahan Empowerment Program Mandiri Gotong Royong by the Community and Family Planning Empowerment Agency in Realizing Village/Kelurahan Independence in Subang Regency has not been optimal. The research method used is descriptive analysis, while the type of approach in this research is qualitative. The type of qualitative approach used is the institutional model case study evaluation. Evaluation of the policy on the Village/Kelurahan Mandiri Gotong Royong empowerment program by the Community and Family Planning Empowerment Agency in Realizing Village/Kelurahan Independence in Subang Regency has not been running effectively, this ineffectiveness will disrupt and have an impact on the progress of community empowerment and its institutions in all existing Villages/Kelurahan in Subang*

*Regency. There are factors that cause the Village/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Empowerment Program Policy by the Community Empowerment and Family Planning Board of Subang Regency to the people of Subang Regency not to run effectively, because there is no ongoing guidance from the Regency Government to villages in the Regency. Subang, so that village development continues without management, the evaluation stages of the old Mandiri Gotong Royong Village/Kelurahan Empowerment Program Policy have made the village/kelurahan saturated.*

**Keywords** : *Policy Impact Evaluation, Village/Kelurahan Empowerment, Village/Kelurahan Independence*

## **A. PENDAHULUAN**

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi di Kabupaten Subang, terutama di daerah pedesaan. Dalam rangka memajukan pembangunan di Kabupaten Subang yang berbasis sumber daya dan budaya lokal, pemerintah Kabupaten Subang meluncurkan program pembangunan Desa Mandiri Gotong Royong melalui Peraturan Bupati Subang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman pelaksanaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong. Untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang dimulai Tahun 2010 sampai tahun 2014 yang terbagi dalam 4 batch kelompok Desa/Kelurahan yaitu :

1. Pemodelan Batch 1 dimulai dengan penentuan 30 lokasi Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Tahun 2009,
2. Pemodelan Batch 2 dimulai dengan penentuan 60 lokasi Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Tahun 2010,
3. Pemodelan Batch 3 dimulai dengan penentuan 80 lokasi Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Tahun 2011
4. Pemodelan Batch 4 dimulai dengan penentuan 83 lokasi Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Tahun 2012,

Evaluasi kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (public policy) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan”. Sebagaimana dijelaskan oleh Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu: 1). Evaluasi awal, bermula sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation); 2). Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; 3). Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik sering kali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan kebijakan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang juga masih dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya :

1. Kurangnya konsistensi dan kesinambungan pembinaan terhadap Desa Mandiri Gotong Royong dari Organisasi Perangkat Daerah
2. Keterbatasan dari Sumber Daya Manusia di Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong
3. Kurang berkembangnya peningkatan kapasitas hubungan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan

Melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul: “Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Subang”

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan format deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, selanjutnya berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi ataupun fenomena tertentu.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dengan teknik pengambilan data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Strategi studi kasus yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini didasarkan kepada pendapat Creswell (1995:12) yang mengatakan “bahwa strategi studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi dengan waktu dan aktivitas, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap, menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan”.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Evaluasi kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (public policy) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan”. Sebagaimana dijelaskan oleh Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu: 1). Evaluasi awal, bermula sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat proses dilaksanakan (ex-ante evaluation); 2). Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; 3). Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation).

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kebijakan publik sering kali terjadi kegagalan dalam meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan DMGR Kabupaten Subang tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, penulis deskripsikan sebagai berikut:

1) Deskripsi Hasil Evaluasi DMGR Desa Jatimulya Kecamatan Compreg.

Desa ini direkomendasikan Tim Evaluator DMGR Kabupaten Subang sebagai Terbaik DMGR / Juara Umum DMGR Tahun 2011. Desa Jatimulya memiliki luas wilayah 955,857 Ha, yang terdiri dari 3 Dusun (Dusun jatimulya, Tanjungsalep dan Rancamulya), 6 Rukun Warga dan 20 Rukun Tetangga. Desa Jatimulya memiliki batas wilayah administrative sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojong Keding Kec. Tambakdahan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukadana Kec. Compreg, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadana Kec. Compreg dan Desa Citrajaya Kec.

Binong, dan sebelah Barat: Desa Binong Kec. Binong dan Desa Tambakdahan. Jumlah Desa Jatimulya sebanyak 4.237 jiwa. Visi Desa Jatimulya adalah DESA JATIMULYA ''BERTANI''

Kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Ipin telah mengantarkan Desa Jatimulya sebagai Desa Terbaik (Juara Umum) Desa Mandiri Gotong Royong (DMGR) Kabupaten Subang pada Tahun 2011 dan Juara 1 Provinsi Jawa Barat serta Juara 1 Bulan Bhakti Gotong Royong Tingkat Nasional Tahun 2012.

Berdasarkan dokumen laporan hasil evaluasi tahun 2011 oleh Tim Evaluasi DMGR Kabupaten Subang dikemukakan hasil evaluasi DMGR Desa Jatimulya Kecamatan Comprang sebagai berikut:

- a. Bidang kebersihan dan lingkungan hidup Desa Jatimulya menunjukkan a) Kantor pemerintahan desa Jatimulya sebagai lokasi percontohan yang bersih, indah, dan hijau kondisinya baik dan terpelihara; b) Kebersihan dan keindahan sekolah baik dan terpelihara; c) Kebersihan dan keindahan tempat ibadah baik dan terpelihara; d) Kebersihan dan penghijauan jalan raya baik dan terpelihara; e) Kebersihan dan keindahan lingkungan pemukiman kurang terpelihara; dan f) keamanan dan ketertiban terkendali.
- b. Bidang Ekonomi masyarakat Desa Jatimulya menunjukkan: a) Pengangguran sedikit; b) Income perkapita sedang; c) Kelembagaan ekonomi ada fungsinya; d) Sarana angkutan umum ada; e) Kelompok tani belum ada; f) Penerapan teknologi pertanian ada berjalan; g) Gerakan pemberantasan HPT ada berjalan; h) Populasi ternak berkembang baik; i) Pengandangan ternak kurang baik; j) Tingkat kesejahteraan sedang; k) Penanggulangan kemiskinan ada berjalan; dan l) Produk unggulan tidak ada.
- c. Bidang kesehatan masyarakat Desa Jatimulya menunjukkan : a) Kematian bayi tidak ada; b) Gizi dan kematian balita tidak ada; c) Cakupan imunisasi lengkap tercakup; d) Pelayanan ibu hamil ada terlayani; e) Pelayanan imunisasi anak sekolah ada berjalan; f) Angka harapan hidup sedang; g) Keluarga berencana baik tercapai; h) Rumah sehat ber-PHBS ada; i) Kegiatan posyandu ada berjalan; j) Desa siaga ada; k) Sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan ada terpelihara; l) Golongan darah dan donor darah ada aktif; dan m) Jarak kandang dan rumah penduduk kurang jauh.
- d. Bidang Pendidikan masyarakat Desa Jatimulya menunjukkan; a) Tingkat pendidikan usia 15 tahun keatas baik; b) Wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah tetap dan tidak berkurang; c) Sarana pendidikan ada; d) Kelompok peduli pendidikan ada tersedia; e) Kesenian dan kebudayaan ada berkembang; f) Sadar pariwisata tidak ada; dan g) Pemuda dan olah raga ada aktif.
- e. Bidang Seni Budaya dan Olah raga Desa Jatimulya menunjukkan: a). a) Tingkat budaya local sangat baik; b) Seni tradisional telah dilestarikan dan tidak berkurang; c) Sarana kesenian ada; d) Kelompok peduli seni budaya ada tersedia; e) Kesenian dan kebudayaan ada berkembang; f) Sadar olah raga telah ada; dan g) Pemuda dan olah raga ada aktif.

- f. Bidang Keamanan Desa Jatimulya menunjukkan: a). Tingkat keamanan sangat baik; b) Tradisi siskamling telah dilestarikan dan tidak menurun; c) Sarana keamanan ada; d) Kelompok siskamling ada tersedia; e) Pembangunan Pos ronda ada berkembang; f) Sadar keamanan lingkungan telah ada; dan g) Pemuda dan masyarakat ada aktif.
- g. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Desa Jatimulya menunjukkan a). Tingkat administrasi pemerintahan Desa sangat baik; b) Kesekretariatan telah di tata dengan baik; c) Sarana tata kelola pemerintahan Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan Desa ada tersedia; e) Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Pemerintahan ada dan ada SPMnya; f) Rasa memiliki pemerintahan telah ada; dan g) Penguatan jaringan institusi Desa ada aktif.
- h. Bidang Agama Desa Jatimulya menunjukkan a). Tingkat toleransi antar agama sangat baik; b) Kesekretariatan keagamaan telah di tata dengan baik; c) Sarana belajar mengajar agama Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan pengajian telah ada; e) Pembangunan Mushola atau madrasah telah ada; f) Majelis talim Desa/Kelurahan telah ada; g) Penguatan jaringan guru ngaji ada aktif.
- i. Bidang Sosial Desa Jatimulya menunjukkan a). Tingkat administrasi kegiatan sosial sangat baik; b) Kesekretariatan kegiatan sosial telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana kegiatan sosial Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan Sosial ada tersedia; e) Kelompok kegiatan Gotong royong ada; f) Donatur untuk kegiatan sosial telah ada; g) Penguatan jaringan pelayanan sosial ada aktif.
- j. Bidang KB dan Kependudukan Desa Jatimulya menunjukkan a). Tingkat administrasi peserta KB sangat baik; b) Kesekretariatan Pos KB telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana pelayanan KB Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan KB ada tersedia; e) Kelompok kegiatan keluarga sejahtera ada; f) Kelompok keteladanan KB telah ada; g) Penguatan jaringan pelayanan KB I ada aktif; h) Pelayanan KTP dan KK rutin dilakukan di Desa/Kelurahan.
- k. Bidang Perpustakaan Desa Jatimulya menunjukkan a). Tingkat administrasi kearsipan sangat baik; b) Kesekretariatan Arsip telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana Arsiparis Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan pengelola arsip ada tersedia; e) Penguatan jaringan pelayanan kearsipan ada aktif.
- l. Bidang Komunikasi dan Informasi Desa Jatimulya menunjukkan a). Tingkat administrasi informasi pembangunan sangat baik; b) Kesekretariatan Komunikasi dan informasi program telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana media komunikasi promosi Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan informasi ada tersedia; e) Kelompok KIE kegiatan Desa/kelurahan ada; g) Penguatan jaringan pelayanan KIE ada aktif.
- 2) Deskripsi Hasil Evaluasi DMGR Desa Bojongtengah Kec.Pusakajaya. Desa ini direkomendasikan Tim Evaluator DMGR Kabupaten Subang sebagai Terbaik DMGR / Juara Umum DMGR Tahun 2012. Desa Bojongtengah memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongjaya

Kecamatan Pusakajaya, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Comprang Kecamatan Comprang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bojongjaya Kecamatan Pusakajaya, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bongas/sungai Cipunagara Kecamatan Pamanukan. Adapun luas Desa Bojongtengah seluas 640,630 ha/m<sup>2</sup>. Visi Desa Bojongtengah adalah “Terwujudnya Bojongtengah Sebagai Desa Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera pada Tahun 2014”. Nama Kepala Desa Bojongtengah H. Rosidin. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dipimpin oleh H. Rosidin telah mengantarkan Desa Bojongtengah sebagai Desa Terbaik (Juara Umum) Desa Mandiri Gotong Royong (DMGR) Kabupaten Subang pada tahun 2012.

Berdasarkan dokumen laporan hasil evaluasi DMGR Tahun 2012 oleh Tim Evaluasi DMGR Kabupaten Subang dikemukakan hasil evaluasi DMGR Desa Bojongtengah Kecamatan Pusakajaya sebagai berikut:

Bidang kebersihan dan lingkungan hidup menunjukkan; a) Kantor pemerintahan Desa Bojongtengah sebagai lokasi percontohan yang bersih, indah, dan hijau kondisinya baik dan terpelihara; b) Kebersihan dan keindahan sekolah cukup; c) Kebersihan dan keindahan tempat ibadah bersih; d) Kebersihan dan penghijauan jalan raya cukup; e) Kebersihan dan keindahan lingkungan pemukiman bersih; dan f) keamanan dan ketertiban kondusif.

a) Bidang Ekonomi masyarakat Desa Bojongtengah menunjukkan: a) Pengangguran ada; b) Income perkapita cukup; c) Kelembagaan ekonomi ada; d) Sarana angkutan umum ada angkutan kota; e) Kelompok tani ada berfungsi; f) Penerapan teknologi pertanian ada

berfungsi; g) Gerakan pemberantasan HPT ada gerakan; h) Populasi ternak berkembang; i) Pengandangan ternak kurang tertata rapi; j) Tingkat kesejahteraan cukup; k) Penanggulangan kemiskinan ada; dan l) Produk unggulan ada.

b) Bidang Kesehatan masyarakat Desa Bojongtengah menunjukkan : a) Kematian bayi ada tetapi rendah; b) Gizi dan kematian balita tidak ada; c) Cakupan imunisasi ada; d) Pelayanan ibu hamil baik; e) Pelayanan imunisasi anak sekolah ada berjalan; f) Angka harapan hidup; g) Keluarga berencana baik; h) Rumah sehat ber-PHBS ada; i) Kegiatan posyandu berjalan baik; j) Desa siaga ada dan berjalan; k) Sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan kurang tersedia; l) Golongan darah dan donor darah ada serta siap; dan m) Jarak kandang dan rumah penduduk kurang jauh.

c) Bidang pendidikan masyarakat Desa Bojongtengah menunjukkan; a) Tingkat pendidikan usia 15 tahun keatas ada; b) Wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah ada; c) Sarana pendidikan lengkap dan berfungsi; d) Kelompok peduli pendidikan ada; e) Kesenian dan kebudayaan ada; f) Sadar pariwisata tidak ada; dan g) Pemuda dan olah raga ada aktif.

d) Bidang kebersihan dan lingkungan hidup Desa Bojongtengah a) Kantor pemerintahan desa bojongtengah sebagai lokasi percontohan yang bersih, indah, dan hijau kondisinya baik dan terpelihara; b) Kebersihan dan keindahan sekolah baik dan terpelihara; c) Kebersihan dan keindahan tempat ibadah baik dan terpelihara; d) Kebersihan dan penghijauan jalan raya

- baik dan terpelihara; e) Kebersihan dan keindahan lingkungan pemukiman
- e) Bidang Seni Budaya dan Olah raga Desa Bojontengah menunjukkan: a) Tingkat budaya local sangat baik; b) Seni tradisional telah dilestarikan dan tidak berkurang; c) Sarana kesenian ada; d) Kelompok peduli seni budaya ada tersedia; e) Kesenian dan kebudayaan ada berkembang; f) Sadar olah raga telah ada; dan g) Pemuda dan olah raga ada aktif.
- f) Bidang Keamanan Desa Bojontengah menunjukkan: a). Tingkat keamanan sangat baik; b) Tradisi siskamling telah dilestarikan dan tidak menurun; c) Sarana keamanan ada; d) Kelompok siskamling ada tersedia; e) Pembangunan Pos ronda ada berkembang; f) Sadar keamanan lingkungan telah ada; dan g) Pemuda dan masyarakat ada aktif.
- g) Bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Desa Bojontengah menunjukkan a). Tingkat administrasi pemerintahan Desa sangat baik; b) Kesekretariatan telah di tata dengan baik; c) Sarana tata kelola pemerintahan Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan Desa ada tersedia; e) Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Pemerintahan ada dan ada SPMnya; f) Rasa memiliki pemerintahan telah ada; dan g) Penguatan jaringan institusi Desa ada aktif.
- h) Bidang Agama Desa Bojontengah menunjukkan a). Tingkat toleransi antar agama sangat baik; b) Kesekretariatan keagamaan telah di tata dengan baik; c) Sarana belajar mengajar agama Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan pengajian telah ada; e) Pembangunan Mushola atau madrasah telah ada; f) Majelis talim Desa/Kelurahan telah ada; g) Penguatan jaringan guru ngaji ada aktif.
- i) Bidang Sosial Desa Bojontengah menunjukkan a). Tingkat administrasi kegiatan sosial sangat baik; b) Kesekretariatan kegiatan sosial telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana kegiatan sosial Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan Sosial ada tersedia; e) Kelompok kegiatan Gotong royong ada; f) Donatur untuk kegiatan sosial telah ada; g) Penguatan jaringan pelayanan sosial ada aktif.
- j) Bidang KB dan Kependudukan Desa Bojontengah menunjukkan a). Tingkat administrasi peserta KB sangat baik; b) Kesekretariatan Pos KB telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana pelayanan KB Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan KB ada tersedia; e) Kelompok kegiatan keluarga sejahtera ada; f) Kelompok keteladanan KB telah ada; g) Penguatan jaringan pelayanan KB ada aktif; h) Pelayanan KTP dan KK rutin dilakukan di Desa/Kelurahan.
- k) Bidang Perpustakaan Desa Bojontengah menunjukkan a). Tingkat administrasi kearsipan sangat baik; b) Kesekretariatan Arsip telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana Arsiparis Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok kegiatan pengelola arsip ada tersedia; e) Penguatan jaringan pelayanan kearsipan ada aktif.
- l) Bidang Komunikasi dan Informasi Desa Bojontengah menunjukkan a). Tingkat administrasi informasi pembangunan sangat baik; b) Kesekretariatan Komunikasi dan informasi program telah di tata dengan baik; c) Saranadan prasarana media komunikasi promosi Desa/Kelurahan ada; d) Kelompok

kegiatan informasi ada tersedia; e) Kelompok KIE kegiatan Desa/kelurahan ada; g) Penguatan jaringan pelayanan KIE ada aktif.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dapat memajukan pembangunan di Kabupaten Subang yang berbasis sumber daya dan budaya lokal sudah berjalan efektif namun secara komprehensif masih terdapat kekurangan dilihat dari dampak atas kelompok sasaran/lingkungan, dampak atas kelompok lain (spillover effects), dampak atas masa depan, dampak atas biaya langsung dan dampak atas biaya tidak langsungnya.
2. Dampak pelaksanaan Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang terhadap masyarakat Kabupaten Subang apabila dilihat dari dampak terhadap kelompok atau desanya sendiri, penanaman pohon di sekitar rumah (pepaya, tanaman obat keluarga dan lain-lain).

Semua rumah sudah mempunyai jamban keluarga dan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan dan terdapat saluran pembuangan limbah rumah tangga,

sedangkan dampak bagi desa lain terlihat dari adanya perubahan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa, dampak terhadap masa depan terlihat dari bidang pendidikan yang bidang pendidikan dengan meningkatnya indeks pendidikan di desa berupa AMH dan RRLS serta menurunnya angka DO SD / MI, SLTP / MTS dan SLTA / MA / SMK dan meningkatnya pendidikan keagamaan di tingkat SD melalui SD Plus, semua desa sudah mempunyai aula yang bisa digunakan sebagai Gedung olahraga dan meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat Desa/Kelurahan antara lain, berkurangnya jumlah perokok, jajanan sekolah yang bebas dari zat pewarna dan pengawet yang merugikan kesehatan, tidak membiarkan ternak berkeliaran, terlaksananya gerakan kebersihan lingkungan dan lain-lain dan berusaha untuk memenuhi sasaran Kebijakan Program Desa Mandiri Gotong Royong dengan cara, memberdayakan ekonomi kerakyatan yang merupakan perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat yang berakar pada potensidan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

3. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten

Subang terhadap masyarakat Kabupaten Subang belum berjalan secara efektif, karena tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Subang, tahapan penilaian Kebijakan Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong yang lama membuat desa menjadi jenuh, begitu juga dengan konsep Modifikasi dari teori Thomas R. Dye (2002) perlu Penguatan Kelembagaan/Jaringan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pemberian Reaward Sustainable dan Pelatihan berkesinambungan. Pemberian Reaward Sustainable yang diberikan seharusnya berupa penghargaan prestise dengan diberikannya kesempatan untuk mengikuti lomba ketingkat yang lebih tinggi sehingga setiap desa termotivasi untuk menjadi Desa Mandiri Gotong Royong dan adanya peran Pemerintah Kabupaten Subang untuk membuka pasar bebas sehingga banyak sumber daya daerah yang dapat tergali.

Disarankan kepada peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan Kebijakan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang terhadap masyarakat Kabupaten Subang belum efektif khususnya dampak terhadap mereka sendiri, lingkungan. Masa depan serta biaya langsung dan biaya tidak langsungnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, Leo. 2008. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dunn, William N. 1994. Public Policy Analysis – An Introduction. Prentice-Hall International: Englewood Cliffs New Jersey.
- Dye, Thomas R. 2002. Understanding Public Policy. Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- \_\_\_\_\_ 2002. Implementation and Public Policy. Mc Graw Hill Book Company.
- Islamy, Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Kebijakan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Jenkins, W. I. 1978. Policy Analysis. Oxford: Martin Robertson.
- Kristian I, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Jurnal Dinamika Vol 9, No 1 (2022) 23-37
- Nigro, Felix A, dan Nigro. 1983. Modern Public Administration. New York: Harper & Row Publisher.
- Nugroho, Riant. 2009. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Osborne, David dan Peter Plastrick. 2000. Reinventing Government. New York: A. Wiliam Patric Book.
- Presthus, Robert. 1975. Public Administration. New York: The Ronald Press Company.
- Thoha, Miftah. 1998. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: Caps.